

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2009

No.	NOMOR PERDA	TANGGAL	TENTANG
1.	NO. 1 TAHUN 2009	17 Juli 2009	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS
2.	NO. 2 TAHUN 2009	17 Juli 2009	PENCABUTAN BEBERAPA BUAH PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH
3.	NO. 3 TAHUN 2009	17 Juli 2009	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 200 TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
JUMLAH		3 Buah PERDA	

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2009

No.	NOMOR PERGUB	TANGGAL	TENTANG
1.	NO. 1 TAHUN 2009	15 Januari 2009	PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA
2.	NO. 2 TAHUN 2009	21 Januari 2009	PENYESUAIAN KEMBALI TARIF DASAR PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DENGAN KAPAL LOKAL YANG BEROPERASI DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3.	NO. 3 TAHUN 2009	30 Januari 2009	PENYESUAIAN KEMBALI TARIFF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
4.	NO. 4 TAHUN 2009	30 Januari 2009	TATA KERJA PARA STAF AHLI GUBERNUR SULAWESI UTARA
5.	NO. 4a TAHUN 2009	27 Februari 2009	PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA), BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA), PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (P3ABT) DAN AIR PERMUKAAN (P3AP) TAHUN ANGGARAN 2009
6.	NO. 5 TAHUN 2009	03 Maret 2009	KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
7.	NO. 6 TAHUN 2009	03 Maret 2009	PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPUS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SULAWESI UTARA
8.	NO. 7 TAHUN 2009	03 Maret 2009	PEMBENTUKAN JABATAN STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA
9.	NO. 8 TAHUN 2009	03 Maret 2009	STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2009
10.	NO. 8a TAHUN 2009	12 Maret 2009	PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009: - SEKRETARIAT DPRD - SEKRETARIAT DAERAH - BIRO UMUM - BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - BIRO KEUANGAN DAN ASET (PPKD) - BIRO SUMBER DAYA ALAM - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

			<ul style="list-style-type: none"> - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA - SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN - BIRO PEREKONOMIAN - PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA - SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - DINAS PENDIDIKAN NASIONAL - DINAS PENDAPATAN DAERAH - DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA - DINAS PEKERJAAN UMUM - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - INSPEKTORAT - BIRO HUKUM
11.	NO. 9 TAHUN 2009	20 Maret 2009	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
12.	NO. 10 TAHUN 2009	20 Maret 2009	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2009-2014
13.	NO. 11 TAHUN 2009	11 April 2009	PEMBATASAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO SELAMA BERLANGSUNGNYA PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) DAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI INISIATIF SEGITIGA TERUMBU KARANG (CORAL TRIANGLE INITIATIVE SUMMIT) AHUN 2009 DI MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA
14.	NO. 12 TAHUN 2009	15 April 2009	PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 38a TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2009
15.	NO. 13 TAHUN 2009	15 April 2009	TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI
16.	NO. 14 TAHUN 2009	07 Mei 2009	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
17.	NO. 15 TAHUN 2009	07 Mei 2009	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
18.	NO. 16 TAHUN 2009	07 Mei 2009	TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
19.	NO. 16a TAHUN 2009	05 Juni 2009	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI UTARA
20.	NO. 17 TAHUN 2009	24 Juni 2009	STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

21.	NO. 18 TAHUN 2009	27 Juli 2009	TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS KAWANUA DI KOTA MANADO DAN SEKITARNYA
22.	NO. 19 TAHUN 2009	31 Juli 2009	MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2009
23.	NO. 20 TAHUN 2009	31 Juli 2009	MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009
24.	NO. 21 TAHUN 2009	07 Agustus 2009	PEMBATASAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO DAN KOTA BITUNG SELAMA BERLANGSUNGNYA PELAKSANAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009 DI KOTA MANADO DAN KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
25.	NO. 22 TAHUN 2009	-	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2008
26.	NO. 23 TAHUN 2009	20 Agustus 2009	PENJABARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2009
27.	NO. 24 TAHUN 2009	05 Oktober 2009	PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
28.	NO. 25 TAHUN 2009	05 Oktober 2009	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
JUMLAH		28 Buah PERGUB	